

BAB IV

KEPENTINGAN POLITIK DAN KEAMANAN CHINA DALAM KEBIJAKAN NEW SILK ROAD

Kebijakan pemerintah China dalam new silk road juga dimaksudkan untuk mendukung kepentingan nasional negara ini dalam aspek politik dan keamanan. Keberadaan China sebagai salah satu negara terluas di dunia ternyata dihadapkan pada berbagai persoalan stabilitas keamanan, baik isu terorisme hingga disintegrasi wilayah. Disinilah new silk road diharapkan dapat menjadi kebijakan preferensial dalam mendukung penyelesaian masalah-masalah tersebut.

Kemudian kebijakan new silk road juga ditujukan pemerintah China untuk mengembangkan hegemoni China karena pada periode kepemimpinan Hu Jintao hingga Xi Jinping negara ini berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal. Selain itu, new silk road juga ditujukan untuk mengembangkan wilayah perbatasan, dimana selama ini China menghadapi persoalan tentang kesenjangan pembangunan. Berbagai kepentingan China dalam kebijakan new silk road ini akan diuraikan pada bab IV sebagai berikut.

A. Mendukung Pencapaian Bidang Politik dan Keamanan

Keberadaan China sebagai salah satu negara dengan wilayah terluas di dunia ternyata dihadapkan pada berbagai persoalan politik dan keamanan. Masalah ini diantaranya pemberontakan Xinjiang dan gerakan pembebasan Tibet. Sejak dekade 1980-an, pemerintah China secara serius menyingkapi persoalan ini sebagai ancaman disintegrasi bangsa. Seiring dengan berkembangnya waktu, pada dekade 2010-an, muncul persoalan/isu baru yaitu terorisme, dimana kalangan pemberontak semakin intensif dalam menjalankan aksi-aksi teror.

Pada tahun 2006 bersamaan dengan dicanangkannya new silk road pemerintah China melalui presiden Hu Jintao menyatakan bahwa new silk road menjadi upaya preferensial dan persuasif untuk mendukung pemerataan pembangunan, sekaligus

mengeliminasi konflik. Hal ini sesuai pertanyaan Hu Jintao dalam sidang politburo China tahun 2006 bahwa :

*“...one belt and road initiative (new silk road) akan membuka kesempatan pemerataan pembangunan, bahkan menangani kemungkinan terburuk yang selama ini melekat yaitu perbudakan dan wilayah-wilayah yang terisolir. Dibutuhkan keyakinan untuk membangun proyek nasional ini untuk mencapai masa depan Zhonguo (China) yang lebih baik.”*⁵⁰

Dari pernyataan di atas dapat difahami bahwa new silk road memiliki peranan penting dalam bidang politik dan keamanan. Secara tidak langsung kebijakan ini dapat menjadi pendekatan (*approach*) dalam mendukung kesejahteraan di wilayah rural, termasuk wilayah Xinjiang dan Tibet. Selain itu, new silk road dapat memudahkan kebijakan-kebijakan pembangunan keamanan karena dapat memudahkan mobilisasi pasukan militer dan keamanan China. Sejak tahun 2008-2013 sekitar 28 institusi keamanan setingkat kompi hingga resimen telah terbangun yang pada akhirnya dapat mendukung stabilitas keamanan wilayah Xinjiang dan Tibet.

1. Mendukung Stabilitas Keamanan di Wilayah Xinjiang

Provinsi otonom Uighur Xinjiang adalah wilayah luas yang terletak di pojok barat laut China. Wilayah ini menjadi tempat tinggal kelompok minoritas Uighur yang berbicara bahasa Turki, atau dulunya disebut Turkistan Timur. Para pejabat China mengklaim bahwa Xinjiang menjadi bagian Xinjiang sejak Dinasti Han. Penduduk Uighur adalah salah satu dari banyak kelompok disana yang berbicara bahasa Turki

⁵⁰ F. Lefferet, “The New Silk Road and China Envolving Grand Strategy”, *The Journal of International Relations*, vol III, University of Chicago, Illionis, 2015, hal.8.

dan secara kesejarahan terhubung dengan Asia Tengah dan tidak menganggap diri mereka sebagai bagian China.⁵¹

Secara resmi, Xinjiang menjadi bagian China setelah negara komunis tersebut menginvasi wilayah itu pada tahun 1949, berbarengan dengan pendudukan Tibet. Kebanyakan penduduk Uighur adalah Muslim dan Islam menjadi bagian penting dari kehidupan dan identitas mereka. Dari 55 minoritas yang diakui China, 10 kelompok lainnya adalah Muslim Sunni. Mayoritas mereka mendiami provinsi barat laut China, Gansu dan Ningxia, dengan kawasan terpadat berada di Provinsi Yunan. Kawasan Xinjiang adalah daerah kaya sumber daya alam sehingga menarik kedatangan para migran dan juga menjadi penghubung strategis negara-negara Asia Tengah.⁵²

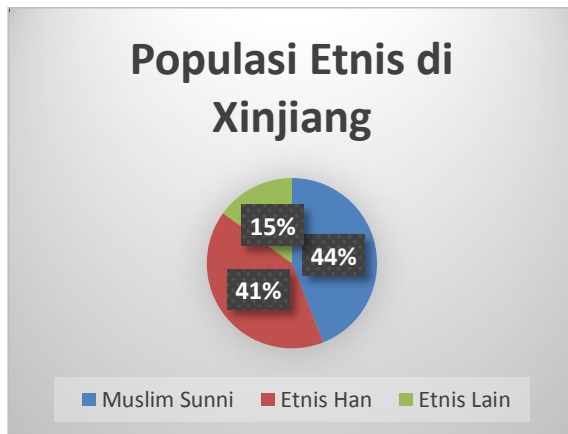
Dengan dibukanya *new silk road* maka kemajuan yang dicapai China pada bidang ekonomi tentunya tidak akan hanya dapat dirasakan oleh wilayah yang dekat dengan kekuasaan (Beijing), namun juga wilayah Xinjiang. Terlebih lagi antara wilayah-wilayah China secara umum dengan terdapat beberapa perbedaan, khususnya berkaitan dengan budaya dan kepercayaan, dimana mayoritas masyarakat Xinjiang beragama Islam.

Hubungan antara pemerintah dan golongan minoritas muslim di China tidak begitu harmonis karena pemerintah begitu banyak menyimpan kecurigaan kepada umat Islam di sana, kecurigaan pemerintah sangat berlebihan terutama kepada etnis Uighur di Xinjiang. Karena mereka menganggap kejadian protes, maupun gerakan yang dilancarkan selama ini rata-rata dipicu oleh kelompok etnis Uighur, selain untuk memperjuangkan terbentuknya Negara merdeka Turkestan Timur, juga untuk memperotes persoalan HAM dan

⁵¹ “Xinjiang Autonomus Profile”, dalam <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-16860974>, diakses pada tanggal 22 Juni 2017.

⁵² “Xinjiang China Autonomus Profile”, dalam <https://www.britannica.com/place/Xinjiang>, diakses pada tanggal 22 Juni 2017.

kemanusiaan yang terjadi di wilayah Xinjiang.⁵³ Gambaran mengenai demografi dan populasi etnis di Xinjiang lihat bagan 4.1. sebagai berikut :



Gambar 4.1. Populasi Etnis di Xinjiang

Sumber : Diolah dari

“<http://www.bin.go.id/internasional/detil/296/5/05/08/2014/gerakan-separatisme-di-xinjiang-china>”, diakses pada tanggal 12 Agustus 2017

Dari bagan 4.1. di atas maka dapat dijelaskan bahwa Xinjiang merupakan wilayah yang menjadi bagian dari kedaulatan China. Perbedaan karakter demografis antara Xinjiang dan wilayah China lainnya mendorong munculnya sentimen kedaerahan. Dari bagasan di atas terdapat dua kelompok besar yaitu Etnis Han sebesar 41 % dan Muslim Sunni sebesar 44%. Atas dasar inilah, meskipun secara nasional Muslim Sunni merupakan minoritas secara nasional, namun menjadi mayoritas di Xinjiang yang kemudian piha

⁵³ “Mengapa China Menindas Kaum Uighur Xinjiang”, dalam <http://permatasim.com/home/mengapa-china-menindas-muslim-uighur-di-xinjiang/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2017.

yang dianggap bertanggung-jawab atas serangkaian pemberontakan kepada pemerintah pusat.

Sentimen separatisme ini juga diperkuat oleh kekhawatiran yang dirasakan rakyat Xinjiang, akibat migrasi secara massif etnis Han ke wilayah mereka. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang dirancang Beijing untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Xinjiang yang jauh tertinggal dari Beijing justru menimbulkan konflik baru, karena etnis Muslim Xinjiang merasa bahwa sector-sektor ekonomi baru yang dibuka pemerintah pusat banyak dikuasai oleh para pendatang etnis Han.⁵⁴

Pemerintah China banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM di Xinjiang, diantaranya pelanggaran kebebasan beragama, kebebasan berkumpul dan berpendapat, hambatan atas pendidikan, diskriminasi, serta hukuman mati terhadap tahanan politik. Keberadaan sekolah Islam, masjid dan imam dikontrol secara ketat, dan para imam diharuskan “berdiri di sisi pemerintah dengan teguh dan menyampaikan pendapatnya dengan tidak samar-samar”. Sejak 1995 hingga 1999, pemerintah telah meruntuhkan 70 tempat ibadah serta mencabut surat izin 44 imam. Pemerintah juga secara resmi menerapkan larangan ibadah perorangan di tempat-tempat milik negara.

Larangan ini juga mencakup larangan shalat, puasa dibulan Ramadhan di kantor atau sekolah milik negara. Kepemilikan Al-Qur’an saja juga dapat dihukum, dan pihak keamanan melakukan pencarian rutin terhadap “penerbitan ilegal” serta “bahan-bahan agama ilegal”. Selain itu, diskriminasi terjadi di sekolah-sekolah, dimana asrama-asrama diperiksa agar tidak ada yang melakukan sembahyang atau bentuk ibadah lainnya. Di bidang tenaga kerja bisnis dan pemerintahan, orang-orang Muslim sering dihambat untuk jabatan yang tinggi. Selain itu, kebijakan keluarga berencana

⁵⁴ “Ethnic Clash : Ethnic Rest in xinjiang”, dalam <http://china.usc.edu/culture-clash-ethnic-unrest-xinjiang>, diakses pada tanggal 22 Juni 2017.

di China juga diklaim menguntungkan suku Han, yang memiliki tingkat pertumbuhan populasi 31.6%, lebih tinggi dibanding suku-suku lain yang maksimal 15.9%.⁵⁵

Di bawah pemerintahan Partai Komunis, terjadi pembangunan ekonomi yang sangat gencar, namun kehidupan warga Uighur semakin sulit dalam 20-30 tahun terakhir akibat masuknya banyak warga China muda dan memiliki kecakapan teknis dari provinsi-provinsi di bagian timur China.

Para migran ini jauh lebih mahir berbahasa China dan cenderung diberi lapangan pekerjaan terbaik. Hanya sedikit orang Uighur berbahasa China. Tidak mengejutkan, ini menimbulkan penentangan mendalam di kalangan warga Uighur, yang memandang perpindahan orang-orang Han ke Xinjiang sebagai makar pemerintah untuk menggerogoti posisi mereka, merongrong budaya mereka dan mencegah perlawanan serius terhadap kekuasaan Beijing.

Dalam perkembangan yang lebih baru, anak-anak muda Uighur terdorong untuk meninggalkan Xinjiang untuk mendapatkan pekerjaan di belahan lain China, dan proses ini sudah berlangsung secara informal dalam beberapa tahun. Ada kekhawatiran khusus atas tekanan pemerintah China untuk mendorong wanita muda Uighur pindah ke bagian lain China untuk mendapatkan pekerjaan. Dan, ini memperkuat kekhawatiran bahwa mereka akhirnya akan bekerja di bar atau klub malam atau bahkan pelacuran tanpa perlindungan keluarga atau masyarakat.⁵⁶

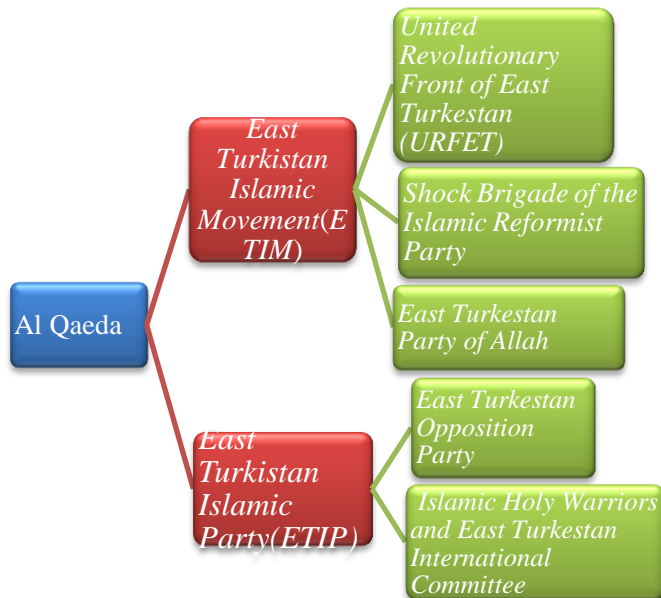
Kejadian tersebut memicu China menyebut Xinjiang dan Uighur sebagai “terrorism, separatism and religious extremism”. Sebelumnya memang telah ada banyak perlawanan-perlawanan kecil seperti peledakan dan penyerangan dalam satu dekade mulai 1990. Pada 2001, bersamaan dengan munculnya kampanye Global War On

⁵⁵ Xinjiang Seethes Under china Crackdown”, dalam <https://www.nytimes.com/2016/01/03/world/asia/xinjiang-seethes-under-chinese-crackdown.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2017.

⁵⁶ Ibid.

Terror oleh Amerika Serikat, China mendaftarkan Eastern Turkestan Islamic Movement (ETIM) ke PBB sebagai salah satu jaringan teroris dunia. China mengaitkan gerakan ini pada Taliban dan Osama Bin Laden yang telah menewaskan 162 orang Han dalam 10 tahun terakhir.

Banyak dari masyarakat Uighur yang menjadi anggota separatis-teroris ini karena tekanan yang dialami oleh masyarakat Uighur sendiri. Mulai dari pembatasan ekspresi beragama, pelarangan menggunakan bahasa Uighur dan kewajiban memakai bahasa China dalam edukasi, sampai kesempatan kerja yang terancam hilang apabila mereka masih menjalankan ritual keagamaan. Meskipun ada yang secara sembunyi tetap menjalankan ibadah atau menggunakan bahasa Uighur, namun perlawanan adalah pilihan terakhir mereka. Boehm mengatakan bahwa, "if a Muslim is placed in that situation, he should emigrate, engage in holy war, or keep his faith secretly until either emigration or holy war is possible," atau dengan kata lain, jihad. Karena globalisasi membuat akses informasi menjadi mudah, maka interkoneksi antara jaringan terorisme satu dengan yang lainnya semakin terbuka dan pergerakan mereka bisa mengancam keamanan banyak negara; tidak hanya China, namun juga negara-negara lain. Contohnya adalah saat anggota ETIM yang dideportasi ke Kyrgyztan menyerang Kedutaan AS di Kyrgyztan, serta tahun 2008 ETIM mengancam keberlangsungan Olimpiade di Beijing. Belum lagi pengeboman bus di Kunming, penyerangan polisi-polisi China, dan yang terakhir peledakan di Tiananmen tahun 2013, semuanya berdampak pada keamanan manusia dan hubungan China dengan negara lain.



Gambar 4.2. Kelompok Separatis Xinjiang

Sumber : Diolah dari

<https://dra.american.edu/islandora/object/auislandora:11373/datastream/PDF/view>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2017

Dari bagan 4.2. dapat dijelaskan bahwa kelompok separatis Xinjiang menjadi organisasi yang dianggap berbahaya karena berhasil berafiliasi dengan jaringan teroris internasional. Induk dari gerakan ini adalah Al-Qaeda yang dianggap bertanggung-jawab dalam serangan teror world Trade Centre (WTC) New York pada 11 September 2001. Kemudian di wilayah Xinjiang kelompok ini pecah menjadi dua menjadi Gerakan ETIM dan Partai Politik ETIM.

Dari Gerakan ETIM dan Partai Politik ETIM. inilah yang melahirkan sub-organisasi diantaranya adalah URFET, Shock Brigade of the Islamic Reformist Party, East Turkestan Party

of Allah, East Turkestan Oppositio Party dan Islamic Holy Warrior and Turkestan International Committe. Ini menunjukkan bahwa selain menggunakan strategi politik dan diplomasi ETIM juga menjalankan tindakan perlawanan bersenjata kepada pemerintahan China.

Islam adalah bagian integral kehidupan dan identitas warga Uighur Xinjiang, dan salah satu keluhan utama mereka terhadap pemerintah China adalah tingkat pembatasan yang diberlakukan oleh Beijing terhadap kegiatan keagamaan mereka. Jumlah masjid di Xinjiang merosot jika dibandingkan dengan jumlah pada masa sebelum tahun 1949, dan institusi keagamaan itu menghadapi pembatasan yang sangat ketat. Anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak diizinkan beribadah di masjid. Demikian juga pejabat Partai Komunis dan aparat pemerintah. Sekolah keagamaan -madrasah- juga sangat dibatasi. Lembaga-lembaga Islami lain yang dulu menjadi bagian sangat penting kehidupan keagamaan di Xinjiang dilarang, termasuk persaudaraan Sufi, yang berpusat di makam pendirinya dan menyediakan jasa kesejahteraan dan semacam kepada anggotanya.

Semua agama di China dikendalikan oleh Administrasi Negara untuk Urusan Agama, tapi pembatasan terhadap Islam di kalangan warga Uighur lebih keras daripada terhadap kelompok-kelompok lain, termasuk etnis Hui yang juga muslim, tapi penutur bahasa China. Ketatnya pembatasan itu akibat pertautan antara kelompok-kelompok muslim dan gerakan kemerdekaan di Xinjiang. Gerakan ini sangat bertentangan dengan posisi Beijing. Ada kelompok-kelompok di dalam Xinjiang yang mendukung gagasan kemerdekaan, tapi mereka tidak diperkenankan mewujudkannya secara terbuka, sebab "memisahkan diri dari ibu pertiwi" dipandang sebagai penghianatan.

Selama satu abad lebih pemerintah China di Xinjiang mengalami banyak masalah dalam hal munculnya berbagai macam gerakan. Dari mulai gerakn pemberontakan yang berusaha mendirikan Negara Republik Turkestan Timur di wilayah Xinjiang hingga pemberontakan yang dikenal dengan

pemberontakan Ili yang didukung oleh militer Uni Soviet yang beraliran nasionalis.

Akar pemberontakan di Xinjiang sebenarnya sudah dimulai sejak Dinasti Han dimana etnis Han bertempur untuk memperoleh hegemoni kekuasaannya di sepanjang jalur caravan di Ili (Yili) dan Tarim yang sebagian besar dihuni oleh etnis Uighur. Namun pada dinasti Qing, daerah-daerah tersebut sudah secara keseluruhan takluk pada kekuasaan Negara China.

Sejak Xinjiang jatuh ke dalam kekuasaan China, Xinjiang sarat dengan konflik etnis dan agama. Tercatat di dalam sejarah sudah berapa kali di Xinjiang terjadi pemberontakan. Tahun 1944-1949 terjadi pemberontakan Ili. Pemberontakan ini dilakukan Muslim Turki untuk mendirikan Negara Islam merdeka. Berbagai macam cara pemerintah lakukan untuk meredam aksi pemberontakan di Xinjiang, pendidikan politik yang pemerintah China berikan pun tidak berhasil mengintegrasikan etnis Uighur dengan penduduk China yang lain. Eskalasi pemberontakan Uighur diperuncing oleh adanya migrasi etnis Han ke wilayah Xinjiang. Dengan datang etnis Han di Xinjiang telah menimbulkan konflik baru, karena etnis Muslim Xinjiang merasa bahwa sektor-sektor ekonomi banyak dikuasai oleh para pendatang etnis Han. Puncaknya adalah terjadinya kerusuhan yang terjadi di di Baren Distrik Akto, pada April 1990.

Akibat kerusuhan tersebut, gerakan separatis Uighur menghadapi tantangan dengan adanya kebijakan tangan besi yang dihembuskan oleh Beijing. Keluarnya dua peraturan, yaitu *the regulations for religious personnel dan regulations on religious activities*, pada September 1990 yang dirancang untuk membatasi aktivitas religius di Xinjiang telah mengancam *status quo* kelompok separatis Uighur di Xinjiang. Secara otomatis muncul keterbatasan yang dialami oleh para pemimpin agama di Xinjiang untuk menyelenggarakan kegiatan agama tanpa persetujuan dan lisensi dari pemerintah.

Perkembangan yang terjadi di Xinjiang menunjukkan betapa rumitnya persoalan yang dihadapi oleh penduduk Xinjiang. Di satu sisi, Beijing sangat berkepentingan untuk memberikan perhatian atas persoalan yang terjadi di Xinjiang. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor ekonomi dimana hasil ekonomi yang diproduksi di Xinjiang khususnya minyak bumi, sangat menopang perekonomian Cina. Sisi yang lain, sering bergolaknya penduduk Xinjiang khususnya kelompok etnis Uighur yang berkeinginan untuk membentuk negara merdeka yang mereka sebut Negara Turkestan Timur, telah menyita perhatian Beijing untuk memperlakukan Xinjiang secara khusus.

Di Xinjiang pun terdapat persoalan politis yang kental dalam kasus yang dialami oleh umat Muslim di sana. Persoalan diskriminasi dalam melakukan kegiatan keagamaan yang dibatasi dan sangat dicurigai oleh pemerintah pusat dan stigmatisasi yang terstruktur atas suatu etnis tertentu, memperlihatkan bahwa pemerintah pusat meskipun menjamin kebebasan setiap penduduk China dalam undang-undang, dalam prakteknya mengalami penyimpangan-penyimpangan.

Contoh kasus seperti para pemuka agama Islam di Xinjiang diharuskan menghadiri undangan pertemuan rutin dari Beijing yang dimaksudkan untuk mengontrol keberadaan umat Islam di Xinjiang agar tidak ada yang terlibat dalam gerakan separatis. Kekhawatiran akan munculnya gerakan separatis itu dipicu oleh intensifnya kegiatan keagamaan di Xinjiang. Oleh sebab itu muncul seruan untuk tidak mengadakan kegiatan keagamaan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan keagamaan yang ilegal/tidak sah. Khususnya di Xinjiang bagian selatan, banyak pemuka agama Islam yang harus mengikuti pendidikan khusus yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi penyalahgunaan forum keagamaan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Beijing.

Berkaitan dengan new silk road maka dengan dibukanya wilayah-wilayah yang terisolir, seperti halnya Xinjiang akan memudahkan program pemerataan pembangunan. Sebagai

contoh sejak tahun 2008 hingga 2013 perkembangan ekonomi di wilayah ini terus berkembang secara progresif hingga angka di atas 5,8 persen pertahun.

Kemudian jika dikaitkan dengan kepentingan bidang keamanan, maka dengan new silk road dapat menjadi pendekatan secara teknis dan keamanan. Hal ini ditandai dengan terbangunnya empat fasilitas militer, diantaranya infanteru military command IV, pusat pengamanan perbatasan (borderness guards), kepolisian nasional China hingga Wolf Division.

2. Mendukung Stabilitas Keamanan di Wilayah Tibet

Tibet adalah suatu kawasan terisolir yang berada di pegunungan Himalaya daratan China. Mayoritas penduduk Tibet beragama Budha yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualnya. Kepemimpinan di Tibet dipimpin oleh seorang Dalai Lama secara turun-temurun. Dalai Lama adalah sosok yang mewakili sisi spiritual dari kehidupan di Tibet. Orang Tibet sendiri mempercayai bahwa keberadaan dalai lama merupakan wujud dari reinkarnasi.⁵⁷

Pada tahun 1950, China menginvasi Tibet. Dan mengklaim bahwa Tibet adalah wilayah otoritarian China. Hal ini mendapat perlawanan dari masyarakat Tibet sehingga menimbulkan konflik antara China dan Tibet. Konflik antara China dan Tibet ini menimbulkan konflik yang berkepanjangan. China sendiri memiliki tujuan terselubung untuk menguasai Tibet yakni Tibet merupakan kawasan yang strategis bagi China, Tibet merupakan wilayah yang penting bagi kepentingan pertahanan nasional China, China ingin mengubah Tibet sebagai suatu wilayah yang memiliki basis militer yang kuat, Tibet kaya akan potensi ekonomi baik berupa kekayaan alam dan wisata, selain itu China ingin menghilangkan nilai-nilai keagamaan di Tibet karena pada dasarnya China sendiri merupakan negara yang berideologikan

⁵⁷ "Tibet Profile and Overview", dalam <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-16689779>, diakses pada tanggal 17 Juni 2017.

Komunis yang sangatlah bertentangan dengan Tibet yang mayoritas penduduknya beragama Budha, sedangkan Tibet sendiri ingin memerdekakan diri dari China dan mendesak China memberikan otonomi khusus bagi pemerintah Tibet.⁵⁸

Konflik yang terjadi antara China dan Tibet ini telah menjadi isu Internasional, dan membuat banyak negara memberikan perhatian karena terdapat berbagai macam isu kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi. Dalam kasus ini pemerintahan China dikatakan melakukan pelanggaran HAM berat dengan tewasnya warga Tibet, penculikan BIKSU-BIKSU di Tibet, dan menghilangnya tahanan di Tibet hal ini terjadi karena China sejak dulu takut jika Tibet dan bagian wilayah China lain akan memisahkan diri. Persoalan yang rumit antara China dengan Tibet ini juga mendorong PBB untuk campur tangan dalam permasalahan ini. Dewan Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (UNHRC) mendesak China agar membuka kembali akses Tibet bagi warga asing, terutama para wartawan, diplomat, pemantau, dan pejuang hak asasi manusia (HAM).

Keberadaan *new silk road* memiliki peranan penting dalam membuka potensi Tibet dari dunia luar, namun tetap menjaga kultur Tibet sebagai wilayah religious Budha di China. Dalam gagasan *new silk road* diharapkan Tibet dapat menjadi wilayah yang otonom, serta dapat menjadi salah satu tujuan dari wisata spiritual Budhis. Secara politik, Tibet memang memiliki banyak keistimewaan, yang sejajar dengan empat wilayah lainnya yaitu Mongolia Dalam, Xinjiang, Guangxi dan Ningxia.⁵⁹

Dalam politik kewilayahan China, negara ini memiliki tiga tingkatan, meliputi daerah ekonomi, prefektur ekonomi dan kabupaten ekonomi. Dengan predikat ekonomi khusus, maka wilayah Tibet dapat memperoleh berbagai hak untuk

⁵⁸ “China and The Tibetans”, dalam <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-14533879>, diakses pada tanggal 22 Juni 2017.

⁵⁹ Dyere June Tofle, 2006, *Asimilization and Political Region of China*, Palgraff Publishing, London and Boulder, hal.49-50.

pengembangan dalam negeri, asimilasi kependudukan, religius dan lain-lainnya. Meskipun demikian perkembangan Tibet masih terkedala berbagai hambatan egografis. Itulah sebabnya new silk road nantinya dapat membuka wilayah Tibet tanpa harus menghilangkan kultur spiritual religius setempat.⁶⁰

Kemudian berkaitan dengan berkembangnya persoalan keamanan, maka pemerintah China setidaknya telah mempersiapkan fasilitas keamanan, diantaranya tiga satuan dari *People Armed Police* (PAP), dua diantaranya termasuk *Border Security Force* dan *Snow Leopard Command Unit* yang memiliki spesifikasi khusus, diantaranya penanganan terorisme, human trafficking dan pembabasan sandera. Selain untuk menjaga wilayah perbatasan, keberadaan institusi kepolisian ini juga untuk melayani masyarakat dan evakuasi medis ketika kondisi darurat. Kebijakan ini tentunya tidak lepas dari new silk road yang berhasil membuka akses ke wilayah paling Barat di Tibet sebagai pusat dari PAP di wilayah tersebut. Hal ini penting untuk menjembatani mobilisasi parat hingga sampai ke pelosok Tibet, sekaligus membuka kesempatan pembangunan yang lebih baik bagi Tibet sebagai tujuan pariwisata spiritual.⁶¹

B. Mengembangkan Bidang Sosial-Ekonomi Wilayah Perbatasan China

Pembangunan di Cina menjadi hal yang menarik karena berkaitan dengan arus migrasi negara-negara Asia ke Cina pada pertengahan tahun 1980-an. Faktor yang mendorong peningkatan migrasi negara-negara Asia ke China dalam rentang tahun 1986 hingga 2002, disamping tingginya tingkat upah di China adalah banyaknya lapangan pekerjaan di China. Sejak realisasi kebijakan politik pintu terbuka (*Open Door Policy*) dibawah kepemimpinan Presiden Deng Xiao Ping, Cina modern

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Valerie Hansen, 2010, *The Silk Road : New History*, Oxford University Press, New York, hal.32.

telah mengalami perkembangan yang luar biasa dalam bidang ekonomi-industri.⁶²

Sejak masa lalu sekitar 17 abad yang lalu, Bangsa Cina merupakan pelopor bagi pengembangan produk-produk yang berguna bagi kehidupan manusia. Empat penemuan Bangsa Cina yang masih digunakan hingga saat ini adalah kompas, serbuk letupan, kertas dan cetakan, pada era globalisasi sekarang ini China tetap menjadi salah satu negara yang mengandalkan sektor industri sebagai penopang perekonomiannya.⁶³

Dalam rentang tahun 1986 hingga 2002, tumbuh berbagai industri-industri strategis padat karya di China. Industri sebagian besar bergerak di sektor agraris dan non-agraris. Industri agraris yang dimaksud adalah pertanian (agriculture) yang mencakup pertanian komoditas beras, gandum, maizena, gula tebu, kentang, kacang dan kapas, sedangkan dari aspek kehutanan dan perikanan sektor industri Cina antara lain bergerak di komoditas karet, tekstil dan makanan kaleng yang nilainya sekitar 44 persen penyumbang pendapatan nasional China dari total sektor industri yang ada.⁶⁴

Pada sektor industri non-agraris China, perkembangan juga menunjukkan taraf yang signifikan, hingga pada tahun 2002, Cina telah menguasai berbagai teknologi mutakhir, antara lain industri semi konduktor, mesin, kendaraan, kimia, persenjataan, elektronika dan pengolahan pertambangan. Sektor industri Cina

⁶² “China Economic Growth”, dalam <https://www.thebalance.com/china-s-economic-growth-cause-pros-cons-future-3305478>, diakses pada tanggal 23 Juni 2017.

⁶³ “The Miracle of Zhongua Cina”, dalam http://books.google.co.id/books?id=myDfxfwNJ3gC&pg=PA222&lpg=PA222&dq=The+Miracle+of+Zhongua+Cina&source=bl&ots=T6OW_KrXut&sig=TT4SOnG1gwHN3HNG8JLpoYppjgo&hl=id&sa=X&ei=fCTsU5OML_Y7k8AX4goKIAg&ved=0CDoQ6AEwAw#v=onepage&q=The%20Miracle%20of%20Zhongua%20Cina&f=false, diakses pada tanggal 19 Juni 2017.

⁶⁴ “China Facts and Figure”, dalam <http://knowledge.allianz.com/demography/population/?367/key-facts-figures-about-chinas-population>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2014.

menyumbangkan pendapatan pada sektor perekonomian sebesar 18 persen, sedangkan sektor jasa sebesar 16 persen, sebagian besar komoditas ini diorientasikan untuk memenuhi pangsa pasar dalam negeri yang pada dasarnya dapat menarik produk secara efektif karena aspek jumlah penduduk yang besar, serta dialokasikan untuk ekspor ke luar negeri.⁶⁵

Perkembangan sektor industri China yang hingga pada tahun 2006, telah menjadi raksasa dunia tidak lepas dari sistem perindustrian yang mengedepankan sistem produksi massal. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi salah faktor penarik kaum migran negara-negara Asia untuk bekerja pada sektor-sektor industri di China, karena pada dasarnya industri-industri China yang mengandalkan produksi massal cenderung memerlukan banyak tenaga kerja. Kasus ini ternyata tidak semuanya dapat dijalankan secara merata di China karena di beberapa wilayah pembangunannya mengalami pelambatan, seperti halnya wilayah Xinjiang.⁶⁶

Selain sektor industri formal China, terdapat juga sektor non-formal, yang juga menjadi sasaran favorit kaum migran negara-negara Asia. Namun sektor ini terkadang menimbulkan problematika yang dilematis karena keberadaannya sering bersinggungan dengan bisnis illegal, antara lain pelacuran, human trafficking dan penyelundupan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar dari kaum migran negara-negara Asia terjebak dalam sistem pelacuran di daerah perbatasan China-Vietnam.⁶⁷

Sebagian besar industri non-formal illegal yang menjadi lapangan kerja strategis bagi kaum migran Vietnam adalah industri prostitusi terselubung. Industri-industri ini banyak terletak di Hekou, sebuah kota kecil di daerah perbatasan negara-

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ “History and Development in Xinjiang”, dalam http://news.xinhuanet.com/zhengfu/2003-06/12/content_916306.htm, diakses pada tanggal 22 Juni 2017.

⁶⁷ Muhadjir Darwin, et, all, *Mobilitas Lintas Batas dan Eksploitasi Seksual di Kawasan Asia Tenggara dan Sekitarnya*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2005, hal.xiii.

negara Asia-China, dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat karena dinilai mampu mencukupi kebutuhan hidup sebagian besar kaum migran negara-negara Asia yang pada umumnya hidup dibawah garis kemiskinan. Berbagai uraian diatas membuktikan bahwa banyaknya lapangan pekerjaan di China, baik yang bersifat formal ataupun non-formal menjadi faktor penarik strategis bagi kaum migran untuk menjalankan ekspansi ke China.

Dekade 2000-an menjadi tolok ukur kemajuan perekonomian China. Dibalik keberhasilan ini ternyata China masih menghadapi beberapa persoalan, antara lain adalah isu diskriminasi pembangunan provinsi akibat penerapan zona pembangunan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nur Bekri yang menjabat sebagai Gubernur Xinnjiang yang menyatakan bahwa :

*“...zonanisasi pembangunan telah menyebabkan dua dampak sekaligus, yaitu kemajuan perekonomian China secara nasional, namun bagi kami (Provinsi Xinjiang) kebijakan tersebut tidak menyentuh kami. Pemerintah dapat menerima, namun masyarakat akan terus memprotes dan sebagian diantaranya (pemberontak Xinjiang) dikhawatirkan akan semakin intensif dalam memberikan perlawanan terhadap pemerintah.”*⁶⁸

Hingga tahun 2012 terdapat 54 zona pengembangan ekonomi dan teknologi tingkat nasional serta zona industry yang menikmati kebijakan khusus. Dari jumlah itu, 27 zona terdapat di kota dan provinsi di sepanjang pantai timur China. Sebanyak Sembilan zona berlokasi di daerah tengah dan 13 lainnya di daerah barat China. Di samping itu, terdapat lima zona industry yang menikmati kebijakan khusus tingkat nasional: Taman Industri Suzhou (provinsi Jiangsu), Zona Pengolahan Ekspor Jinqiao (Shanghai), Haichang (Xiamen, provinsi Fujian), Zona

⁶⁸ “Chinese Governors Signals Crackdown on Separatism”, dalam <http://www.nytimes.com/2014/03/07/world/asia/chinese-governor-signals-crackdown-on-separatists.html? r=0>, diakses pada tanggal 22 Juni 2017.

Pengembangan Daxie (Ningbo, provinsi Zhejiang), dan Zona Pengembangan Ekonomi Yangpu (Provinsi Hainan).⁶⁹

Zona pengembangan ekonomi dan teknologi pada tingkat nasional di daerah kota dan pantai timur yang ditetapkan sebelum tahun 1995 berkembang pesat. Zona pengembangan ini memanfaatkan benar keuntungan geografis yang ada dan menaikkan status mereka menurut pembagian kerja internasional. Sementara itu, zona pengembangan tingkat nasional yang letaknya di bagian barat dan tengah kota serta provinsi China mengambil keuntungan dari sumber daya lokal yang ada. Zona ekonomi ini secara aktif menyerap dana asing dan menggenjot ekspor.⁷⁰

Akibatnya skala volume dan nilai ekspornya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selain itu, optimalisasi dari pemanfaatan dari pemanfaatan lahan juga secara cermat dilakukan. Pada akhir tahun 2004, sebanyak 49 zona pengembangan menempati 580 kilometer persegi tanah. Dari jumlah itu, terdapat 32.100 perusahaan di dalam zona pengembangan dimana 51,4 persen diantaranya merupakan perusahaan asing. Rata-rata dalam setiap kilometer persegi terdapat 67 perusahaan dan pabrik dengan nilai produk industri setiap kilometer persegi tanah sebesar 3 miliar yuan.⁷¹

⁶⁹ “Understanding Developing Zones in China”, dalam <http://www.china-briefing.com/news/2011/10/05/understanding-development-zones-in-china.html>, diakses pada tanggal 22 Juni 2017.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ “China Special Economic Zone”, dalam http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch5en/conc5en/China_SEZ.html, diakses pada tanggal 22 Juni 2017.